

## UNTUK TONO CITY JEPANG Disiapkan Tenaga Terampil



KR-Toto Rusmanto

**Zoom meeting Pembab Purbalingga dengan Walikota Tono City Jepang.**

PURBALINGGA (KR) - Kerja sama pengiriman tenaga kerja asal Purbalingga ke Tono City Jepang berlanjut. Pemerintah kabupaten (Pembab) Purbalingga akan melakukan seleksi warga terbaik untuk dilatih dan selanjutnya dikirim menjadi tenaga kerja di Tono City. Pengiriman tenaga kerja asal Purbalingga itu merupakan implementasi perjanjian kerja sama pembab Purbalingga dengan pemerintah Tono City Jepang.

Dalam kunjungan ke Tono City pada September 2023, Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi juga menandatangani kesepakatan bersama dengan Walikota Tono City, Kazuhiko Tada. Kerja sama tersebut terkait penempatan tenaga kerja asal Purbalingga di Tono City.

Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dinporapar) Budi Setiawan mewakili Pembab Purbalingga mengikuti rakor melalui kanal zoom meeting dengan Walikota Tono City dan stafnya, Kamis (7/11). Horiba Akiko juru bicara sekaligus penerjemah pemerintah Tono City mengungkapkan, pemerintah Tono City menyukai tenaga kerja Indonesia. Warga Indonesia yang tinggal di Tono City juga merasa senang dan betah tinggal di kota itu.

Horiba Akiko menambahkan, pemerintah Tono City Jepang juga mengadakan kerja sama dengan pemerintah negara Nepal. Karenanya di kota itu banyak terdapat warga negara Nepal. "Warga Tono City juga menerima warga Indonesia dan warga Nepal dengan senang," ujar Horiba mengutip pernyataan Walikota Kazuhiko Tada. **(Rus)-d**

## PILKADA SUKOHARJO 2024 9.135 Anggota KPPS Dilantik

SUKOHARJO (KR) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo melantik 9.135 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) secara serentak, Kamis (7/11). Pelantikan dilakukan sebagai bagian dari persiapan menjelang pelaksanaan Pilkada 2024. Masa kerja anggota KPPS berlangsung selama satu bulan, sejak 7 November hingga proses pemungutan suara selesai.

Anggota KPU Sukoharjo sekaligus Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Partisipasi Masyarakat dan SDM, Murwedhy mengatakan, pelantikan KPPS ini melibatkan PPS di 167 desa dan kelurahan yang tersebar di 12 kecamatan. "Pelantikan dilakukan oleh PPS, namun tetap dimonitori oleh PPK di setiap kecamatan," jelasnya.

Setelah dilantik, para anggota KPPS akan mengikuti bimbingan teknis (bimtek) di setiap desa. Bimtek juga diselenggarakan oleh PPS dengan dukungan dari PPK sebagai untuk memastikan kesiapan seluruh anggota KPPS dalam pemungutan suara 27 November 2024.

Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo, Syakbani Eko Raharjo menambahkan, di Kabupaten Sukoharjo ada 1.305 Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan setiap TPS akan dilayani oleh tujuh anggota KPPS. KPU Sukoharjo juga sudah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2024 sebanyak 684.491 orang. Dari jumlah tersebut pemilih perempuan 346.494 orang, sedangkan pemilih laki-laki 337.997 orang. **(Mam)-d**

## DILANTIK MENJADI ANGGOTA KPPS Atul Masih Pakai Gaun Pengantin

PERNIKAHAN adalah hari istimewa yang dinanti oleh setiap orang. Begitu pula dengan Mubtadiatul Jannatu Musyarofah (27) atau Atul yang Kamis (7/11) lalu mengikat janji suci dengan pasangannya di Desa Babakan Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyuwangi. Namun, di balik kilauan gaun pengantin biru muda dan suasana bahagia pernikahan, ada momen yang tak biasa.



KR-Driyanto

**Atul mengikuti pelantikan anggota KPPS memakai busana pengantin.**

Saat itu juga, Atul menyempatkan diri menghadiri pelantikan sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Meski sedang menjalani momen sakral pernikahan, Atul tetap datang di balai desa untuk dilantik sebagai anggota KPPS. Hal itu menunjukkan betapa besar komitmen Atul terhadap tugas yang sudah diemban.

Dengan riasan lengkap dan gaun pengantin, kehadiran Atul dalam pelantikan tersebut disambut riuh tepuk tangan oleh rekan-rekan KPPS serta para tamu undangan yang hadir. Mereka tidak hanya mengapresiasi langkah Atul, tetapi juga merasa terhibur dengan situasi unik yang jarang terjadi.

"Saya memang punya kewajiban sebagai anggota KPPS, jadi saya merasa harus hadir dalam pelantikan ini," ujar Atul. Ia mengaku, baru diberitahu tentang jadwal pelantikan tiga hari sebelumnya, padahal persiapan pernikahan sudah jauh-jauh hari ditetapkan. "Enggak apa-apa, saya harus jalani dua momen penting sekaligus. Lagipula, itu sudah jadi tanggung jawab saya," tambah Atul, yang saat itu hanya bisa hadir sebentar untuk mengucapkan sumpah sebagai anggota KPPS. Selanjutnya, ia langsung kembali ke rumah untuk melanjutkan prosesi adat *begalan* dan prosesi lain dalam pernikahan. **(Driyanto)**

## KUNJUNGI KANTOR IMIGRASI SURAKARTA

# DPR RI Pantau Pelayanan Paspor

KARANGANYAR (KR) - Guna memastikan layanan keimigrasian dilaksanakan sesuai prosedur, Komisi XI- II DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I TPI Surakarta, Kamis (7/11). Kegiatan ini dilakukan usai Rapat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI di The Alana Hotel and Convention Center Solo.

Hadir dalam kesempatan itu, para anggota Komisi XI- II yang diketuai Rinto Subekti dari Fraksi Partai Demokrat, Sugiat Santoso selaku Wakil Ketua Tim, dan Adik Sasongko dari Fraksi Partai Gerindra. Para wakil rakyat yang bertugas di Gedung DPR Senayan itu antusias melihat

proses pegawai melayani. Kemudian Gedung Kanim Surakarta yang sedang direhab, dilihat lebih dekat.

Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Is Edy Ekoputranto dan Kepala Kanim Surakarta Winarko menjelaskan bahwa rehab kantornya merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kenyamanan bagi para pengguna layanan.

"Rencananya kami mau merelokasi kantor ini, karena keterbatasan lahan parkir dan ruang layanan menjadi kendala utama di Kanim Surakarta," ungkap Is Edy.

Hal serupa juga disam-

paikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Tejo Harwanto.

"Kanim Surakarta ini telah mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Mereka terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Layanan yang cepat, mudah dan sesuai regulasi," jelas Tejo yang juga hadir bersama Kepala Divisi Administrasi Anton Edward Wardhana, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kadiyono, serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Anggiat Ferdinan.

Kunjungan singkat tersebut hanya mengarah pada satu titik, yakni ruang layanan pembuatan paspor



KR-Abdul Alim

**Rombongan Komisi XIII DPR RI saat mengunjungi Kantor Imigrasi Surakarta.**

yang sementara dialihkan ke lantai 2. Meskipun dengan keterbatasan, namun upaya yang dilakukan oleh Kanim Surakarta mendapatkan apresiasi dari anggota DPR. Beberapa terobosan alternatif dan inovatif

diakui sebagai langkah jitu untuk mengatasi keterbatasan. Di akhir kunjungan, anggota DPR berharap Kanim Surakarta terus melakukan upaya nyata untuk mengoptimalkan layanan kepada masyarakat. **(Lim)**

## DPRD TEMANGGUNG LAKUKAN PENCERMATAN

# Bupati Sampaikan Rancangan APBD 2025

TEMANGGUNG (KR) - Pj Bupati Temanggung Hari Agung Prabowo menyampaikan Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah 2025 dalam rapat paripurna yang digelar DPRD setempat, Jumat (8/11). Rapat dipimpin Ketua DPRD Yuniyanto, dihadiri segenap anggota DPRD dan pejabat dilingkungan pembab setempat.

Hari Agung mengatakan pembangunan daerah tahun 2025 difokuskan pada peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar pada kesehatan, pendidikan dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting. Selain itu, percepatan penurunan kemiskinan ekstrem, peningkatan rata-rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif melalui peningkatan prestasi pemuda dan olahraga.

"Pembangunan juga difokuskan pada optimalisasi pemanfaatan teknologi untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi," jelas Hari. Fokus lain dalam pembangunan adalah percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengelolaan hasil pertanian pengembangan UMKM, pe-

ngembangan pariwisata dan budaya.

Fokus pembangunan juga untuk reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik. Berhubungan implementasi kebijakan nasional, lanjut Pj Buati, pembangunan berfokus pula pada penurunan stunting menjadi 14 persen, penurunan angka kemiskinan dan pengendalian inflasi daerah.

Dia mengatakan secara ringkas pendapatan daerah untuk 2025 ditarget Rp 1,964 triliun, mengalami penuh penurunan Rp 93,2 miliar atau berkurang 4,53 persen dibandingkan tahun 2024. Pendapatan asli daerah di target Rp 406,6 miliar, yang terdiri dari pajak daerah Rp 138,3 miliar, retribusi daerah Rp 10,9 miliar, hasil pengelolaan

kekayaan daerah Rp 21,3 miliar, dan lain-lain pendapatan yang sah Rp 235,9 miliar.

Dikatakan, pendapatan transfer ditarget Rp 1,55 triliun yang terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat Rp 1,47 triliun, pendapatan transfer antar daerah Rp 81,3 miliar. "Dana transfer ini dari pemerintah pusat yang terdiri dari dana desa Rp 239,3 miliar, dana bagi hasil pusat Rp 62,8 miliar, dana alokasi umum Rp 820,7 miliar, dan dana alokasi khusus Rp 353,3 miliar.

Sementara itu, untuk anggaran belanja direncanakan Rp 2,060 triliun, yang terdiri dari belanja operasi Rp 1,56 triliun, belanja modal Rp 89,8 miliar, belanja tidak terduga Rp 1 miliar, dan belanja transfer Rp 403 miliar.

Pembiayaan daerah direncanakan Rp 96,4 miliar, yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp 16,3 miliar atau bertambah Rp 20,40 miliar, naik 5 persen dibandingkan dengan anggaran perubahan APBD tahun 2024. "Penerimaan pembiayaan daerah tahun anggar-

an 2025 hanya bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun sebelumnya (2024) yang direncanakan sebesar Rp 161,4 miliar. Sedangkan pengeluaran pembiayaan direncanakan Rp 65 miliar yang digunakan untuk pembentukan dana cadangan," ungkap Hari Anung.

Juru bicara FPPP PAN Slamet Eko Wantoro mengatakan pendapatan dalam RABPD tahun 2025 menurun dibanding tahun 2024, walaupun dari sisi estimasi pendapatan daerah juga mengalami penurunan sebesar 4,53 persen, dari total Rp.2,057 triliun menjadi Rp.1,964 triliun. "Adanya penurunan tersebut maka perlu adanya inovasi agar semua kegiatan penting bisa terdani," jelas dia.

Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Masfuddin mengatakan, untuk peningkatan pendapatan yang bersumber dari DAK dan DAU, Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu melakukan pendekatan melalui lobi-lobi, baik ke Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. **(Osy)-d**

## DALAM MENENTUKAN UMK SUKOHARJO 2025

# Buruh Minta Gunakan Survei KHL Lagi

SUKOHARJO (KR) - Buruh Sukoharjo meminta survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) digunakan dalam menentukan upah minimum kabupaten (UMK) tahun 2025. Aturan tersebut kembali digunakan setelah sebelumnya lama diganti menggunakan kebijakan baru pemerintah mengacu inflasi. Penerapan KHL dilakukan menyusul dikabulkannya gugatan buruh oleh Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Ketua Forum Peduli Buruh (FPB) sekaligus Ketua Serikat Pekerja Republik Indonesia (SPRI) Sukoharjo, Sukarno mengatakan, dikabulkannya gugatan buruh terhadap Undang Undang Cipta Kerja oleh MK menjadi angin segar bagi buruh. "Salah satunya berkaitan dengan penentuan besaran UMK tahun 2025 mendatang," jelasnya, Jumat (8/11)

Menurutnya, buruh Sukoharjo menganggap penting peranan hasil putusan MK yang mengabulkan gugatan buruh terkait Undang Undang Cipta Kerja terhadap perbaikan kesejahteraan pekerja. Sebab, dalam putusannya MK meminta perubahan dasar penentuan upah dalam Undang Undang Cipta Kerja menggunakan survei KHL.

"Survei KHL itu bersifat riil di lapangan dimana berpengaruh besar terhadap penentuan upah buruh dalam UMK. Harga kebutuhan pokok naik dan upah juga harus mengikuti kenaikan tersebut," ungkap Sukarno.

Dikatakan, ada tujuh poin yang dikabulkan MK sesuai dengan gugatan buruh. Yakni sistem pengupahan, outsourcing, masalah pemutusan hubungan kerja (PHK), soal kontrak kerja atau PKWT, tenaga kerja asing, istirahat panjang dan cuti, kepastian upah untuk pekerja

perempuan yang menjalani cuti haid dan cuti melahirkan. "Seperti sistem pengupahan tersebut, bagaimana nanti penentuan upah kembali menerapkan survei KHL. Sistem tersebut sudah lama tidak dipakai setelah diterapkan Undang Undang Cipta Kerja," tandas Sukarno.

FPB Sukoharjo menilai kondisi buruh sekarang sedang sulit. Di sisi lain menerima upah murah, di sisi lain sulit memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Buruh juga dihadapkan masalah dengan adanya kebijakan perusahaan yang memberatkan, seperti diliburkan atau dirumahkan. "Kami lihat banyak buruh, khususnya di perusahaan tekstil, sejak awal Januari 2024 lalu sampai sekarang diliburkan atau dirumahkan. Nasib buruh tersebut tidak jelas karena tidak mendapat upah saka sekali," kata

Sukarno.

Sukarno menjelaskan, buruh selama ini sering menjadi pihak yang lemah dan dikorbankan karena tidak adanya aturan memihak buruh. Aturan yang ada sekarang justru lebih memihak kepada pengusaha dan penguasa.

Aturan yang diminta buruh untuk segera diperbaiki adalah Undang Undang Cipta Kerja (Ciptaker) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Kedua aturan tersebut sejak pertama kali ditetapkan pemerintah sudah ditolak buruh.

Sukarno mencontohkan kerugian buruh di antaranya terkait uang pensiun dan status pekerja atau buruh kontrak. Besarnya beban hidup serta upah murah dikhawatirkan akan menambah angka kemiskinan. **(Mam)-d**

## JUGA GELAR KONSOLIDASI DI SRAGEN

# Andika Perkasa Temui Buruh dan Kader

SRAGEN (KR) - Calon Gubernur (Cabug) Jawa Tengah nomor urut 1 Andika Perkasa menemui pekerja pabrik di PT Aroma Sukowati Sragen, Jumat (8/11). Jagoan PDI Perjuangan ini juga menggelar konsolidasi dengan ribuan kader PDIP di Gedung Sasana Mangala Sukowati (SMS) Sragen.

Usai menemui para pekerja, Andika menyampaikan bahwa kehadirannya untuk melihat kondisi riil di masyarakat. "Kita lihat realita di lapangan, meski sudah pegang data. Pada umumnya aspirasi yang disampaikan para pekerja yakni kekhawatiran tentang keberlangsungan pekerjaan," ujarnya usai mengunjungi pabrik rokok PT Aroma Sukowati Sragen.

Menurut Andika, adanya pemberitaan soal PT Sritex yang pailit sedikit banyak membuat pekerja khawatir. Dengan mendengar langsung aspirasi pekerja, setidaknya bisa dipakai untuk mengambil kebijakan pemerintah provinsi. Selain itu, permasalahan pabrik tekstil tentu juga besar.

"Sritex termasuk pabrik tekstil terbesar di Indonesia. Ada banyak keluarga yang bergantung dengan Sritex. Kalau dari provinsi dan kabupaten nggak kuat, maka kami terima kasih pada Presiden Prabowo yang terjun dan membantu," ujarnya.

Ketua DPC PDI Perjuangan Sragen, Untung Wibowo Sukawati mengatakan kedatangan Andika Perkasa ke Sragen dalam rangka

menggelar Rapat Kerja Anak Cabang Khusus (Rakercabus) untuk Konsolidasi kemenangan Andika-Hendi.

"Persiapan pemenangan sampai tingkat bawah terus dilakukan. Sebanyak 3.500 kader hadir saat konsolidasi di Gedung SMS," jelasnya.

Bowo yang juga Cabup Sragen mengungkapkan kedatangan Cabug Andika mendapat respons antusias dari warga Sragen. Beberapa kali Andika mengunjungi pabrik di Sragen dan selalu mendapat respon positif masyarakat. Pembawaan Andika Perkasa yang kalem, tenang, selalu senyum dan ramah membuat masyarakat terkesan.

"Masyarakat terlihat nyaman dan antusias saat Pak



KR-Said Masykuri

**Andika Perkasa didampingi Cabup Sragen Untung Wibowo Sukawati menemui pekerja PT Aroma Sukowati.**

Andika datang. Perkenalkan diri beliau juga sambutan dan disambut baik terutama ibu-ibu," tambahnya. Bowo optimistis pilgub dan pilbup yang tinggal hitungan hari akan positif hasilnya bagi PDI Perjuangan. Hal ini dilihat dari beberapa kali survei, calon

yang diusung PDIP sudah unggul.

"Insyallah baik pilgub maupun pilbup, kita (PDIP) akan menang. Tinggal langkah pemantapan menuju hari H coblosan 27 November mendatang," tandasnya. **(Sam)-d**